



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# REVIU RENCANA STRATEGIS BPPSDM

2023-2024



#2024  
KKP BEYOND

## **TIM PENYUSUN**

### **PENGARAH**

Kepala BPPSDMKP

### **PENANGGUNG JAWAB**

Sekretaris BRSDM

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

### **KETUA TIM PENYUSUN**

Tri Yuwono

### **TIM PENYUSUN**

Indriani Musthafia

Don Bapkas Nisnoni

M Guntur

Nadia Permata Sari Putri

Rahayu Boru Sirait

Ariesta Putri Ramadani

Nurkholis Abelian Pristy

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
INFORMASI UMUM.....	1
1.1. Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra BPPSDM.....	1
1.2. Dasar Hukum Reviu.....	3
1.3. Tujuan Reviu.....	4
1.4. Ruang Lingkup Reviu.....	4
BAB II.....	5
URAIAN HASIL REVIU.....	5
2.1. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2021 -2024.....	6
2.2. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja Transformasi BRSDM ke BPPSDM Tahun 2023-2024.....	10
2.3. Penyesuaian Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024.....	17
BAB III.....	20
PENUTUP.....	20

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **1.1. Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra BPPSDM**

Proses evaluasi perencanaan pembangunan merupakan suatu proses evaluasi yang secara berkesinambungan dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan sistem perencanaan pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis BRSDM 2020-2024 tidak luput dari proses evaluasi, dimana Renstra tersebut mengalami evaluasi untuk menanggapi perubahan kondisi lingkungan strategis aktual yang terjadi di lingkup nasional, kementerian, atau sub-sektor perikanan budidaya itu sendiri. Proses evaluasi perencanaan tersebut mulai dilakukan pada tahun 2021.

Awalnya, pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Menindaklanjuti Renstra KKP tersebut, BRSDM telah menetapkan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Kepala BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024. Kemudian untukantisipasi perubahan kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tindak lanjut implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan.

Perubahan kelembagaan ini memerlukan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis yang berfokus pada memperkuat SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pada Renstra BRSDMKP tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BRSDM 2023 dalam mendukung kebijakan pembangunan KP dan arah kebijakan KKP melalui penyediaan SDM Kompeten dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP. Arah kebijakan menetapkan agenda prioritas dalam rangka pemulihan kesehatan laut serta percepatan pertumbuhan ekonomi kelautan berkelanjutan dengan 5 strategi kebijakan 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut, 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, 4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 5) Pembersihan Sampah Plastik, melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kunci keberhasilan penerapan ekonomi biru (*blue economy*) dimaksud adalah ketersediaan SDM Unggul yang akan didukung melalui strategi sinergi kegiatan BRSDM dalam bentuk *Vocational Goes to Actor* (VOGA), pelatihan, dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

VOGA sebagai salah satu program prioritas BPPSDM yang mengkolaborasikan tiga fungsi BPPSDM, yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi KKP yang berbasis kompetensi dengan penerapan kepada masyarakat KP dilakukan langsung di lokasi pengembangan program prioritas KKP. Implementasi VOGA dituangkan dalam kegiatan: Kampung Nelayan Modern (Kalamo), dan lokasi potensi perikanan lainnya melalui strategi VOGA berkonsep *Smart Fisheries Village* (SFV). Implementasi SFV BPPSDM tahun 2024 yaitu; 1) penguatan/penyesuaian juklak SFV, 2) penguatan 10 (sepuluh) SFV Desa lanjutan 2023, 3) pengembangan 1 (satu) SFV Desa 2024, 4) dukungan pembangunan Bale SFV di 4 (empat) lokasi Kalamo, serta 5) penguatan 20 (dua puluh) SFV UPT dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan PNB

Selaras dengan kebijakan KKP, BPPSDM melakukan transformasi pendidikan kelautan dengan implementasi; 1) penyediaan database lulusan satuan pendidikan (*tracer study*) yang tervalidasi, 2) penguatan kurikulum pendidikan vokasi yang berbasis industri, 3) penyiapan mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung Program Prioritas KKP dan DUDI, 4) Meningkatkan kapasitas dosen melalui magang dan sertifikasi dosen, 5) penyiapan BLU satker Pendidikan, 6) Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 berasal dari 100% anak pelaku utama secara transparan berbasis digital, dan 7)

melakukan analisis daya tampung asrama dan pengembangannya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, serta 8) mendorong penelitian yang kompetitif dan menghasilkan produk inovatif.

Selain itu BPPSDM melakukan transformasi pelatihan melalui pengembangan 1) sistem penyelenggaraan diklat, ujian dan sertifikasi awak kapal perikanan (AKP), 2) sistem penyelenggaraan diklat, ujian dan sertifikasi teknis KP dan 3) optimalisasi pengembangan kompetensi ASN melalui *corporate university*, dan 4) penyusunan grand desain pelatihan vokasi untuk sektor KP

BPPSDM berkomitmen untuk melakukan dukungan kegiatan penyuluhan terhadap program prioritas KKP melalui 1) pendampingan oleh penyuluh perikanan pada program prioritas KKP, 2) persiapan road map penyuluhan tahun 2024-2029, 3) penguatan sistem informasi penyuluhan 4) reviu NSPK terkait penyuluhan dan 5) penguatan penguasaan metodologi penyuluhan untuk penyuluh perikanan

Menindaklanjuti perkembangan perubahan arah kebijakan/program/kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran/Indikator/volume target diperlukan reviu/evaluasi terhadap Sasaran/Indikator/volume target pada Renstra BPPSDMKP tahun 2020 – 2024 berdasarkan analisis capaian, analisis tindak lanjut dan *action plan* yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

## **1.2. Dasar Hukum Reviu**

Revisi Rencana Strategis BRSDM tahun 2020- 2024 dilaksanakan berdasarkan pada dasar hukum sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyusunan Renja K/L;
- d. Peraturan Menteri KP nomor: 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- e. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

### **1.3. Tujuan Reviu**

Tujuan Reviu atas Revisi Renstra BRSDM adalah:

- a. Menelaah ulang relevansi dokumen Revisi Rencana Strategis BRSDM tahun 2020- 2024 terhadap target output dalam sistem perencanaan pembangunan sumberdaya manusia KP, agar Dokumen Renstra BRSDM sesuai dengan perubahan-perubahan aktual dalam lingkungan strategis di lingkup nasional, KKP dan BRSDM;
- b. Melakukan penyesuaian dokumen Revisi Rencana Strategis BRSDM tahun 2020-2024 selaras dengan dokumen kinerja BRSDM lainnya.

### **1.4. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup Reviu atas Revisi Renstra BRSDM Tahun 2020-2024 adalah pada Bab IV, mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I, meliputi:

- a. Indikator dan Target 2021 – 2024 dan Capaian Kinerja Utama BRSDM Tahun 2021-2022;
- b. Perbandingan Kinerja BRSDM Tahun 2022 - 2023;
- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon I Kepala BRSDM Tahun 2022 dan 2023.

## BAB II URAIAN HASIL REVIU

### 2.1. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2024

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Program 2021	Sasaran Program 2022-2024	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Reviu Renstra	Realisasi LKj	Target Reviu Renstra	Target Renstra
				2021	2021	2022	2022	2023	2024
Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	62	62,58	65	66,01	70	75
		2	Nilai PNBPN BRSDM (Rupiah Miliar)	-	-	15,45	18,38	24,731	-
	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	298	334	369	388	392	255	
Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuh kembangkan	4	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)	2.000	3.613	3.000	4.029	3.000	2.000
		5	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)	1500	1.794	1.800	1.972	1.800	1.500
	6	Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	-	-	14.082	15.221	12.342	-	
Hasil riset dan inovasi kelautan	Iptek Hasil Kegiatan	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (paket)	11	12	7	7	7	11

Sasaran Program 2021	Sasaran Program 2022-2024	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Reviu Renstra	Realisasi LKj	Target Reviu Renstra	Target Renstra
				2021		2022		2023	2024
dan perikanan dimanfaatkan	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat								
	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang ditingkatkan (unit)	-	-	13	38	39	-
	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	9	Hasil Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (perumusan kebijakan)	-	-	21	-	11	-
		10	Hasil Inkubator Bisnis KP yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (start up)	-	-	6	-	-	-
Hasil riset dan inovasi kelautan dan perikanan dimanfaatkan	-		Rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	24	27	-	-	-	30
	-		Hasil riset KP yang digunakan sebagai bahan penyusunan RSNI (paket)	1	1	-	-	-	1
	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor Industri	11	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri (paket)	3	3	2	-	-	3

Sasaran Program 2021	Sasaran Program 2022-2024	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Reviu Renstra	Realisasi LKj	Target Reviu Renstra	Target Renstra
				2021		2022		2023	2024
	Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	12	Data, Informasi dan Peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	11	12	11	-	-	11
Hasil riset WPP mendukung sumber daya Perikanan berkelanjutan		13	Rekomendasi potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkeanjutan pada 11 PP (kajian)	2	2	3	-	-	3
Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	11	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	31	32,85	32	33,65	33,5	36
		12	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	10	10	11	13	15	13
		13	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%)	<1	0,02	<1	0,01	<0,5	<1
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	73	79,73	74	79,94	75	76
		15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)	86,15	86,65	86,25	81,22	80,5	86,75
		16	Maturitas SPIP Lingkup BRSDM (level)	3	3	3	3	3,1	3
		17	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	98,46	86	99,86	92	90
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)	65	88,73	70	81,23	75	80

Sasaran Program 2021	Sasaran Program 2022-2024	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Reviu Renstra	Realisasi LKj	Target Reviu Renstra	Target Renstra
				2021		2022		2023	2024
		19	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	5	-	1
		20	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (Nilai)	-	-	-	-	75	-
		21	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89	95,21	89	93,71	89	90
		22	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86	92,08	86	92,03	86	89
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	72,5	77,5	75	90	77,5	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	72,5	77,40	75	88,66	77,5	72,5
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih		25	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4.600	5214	4.960	5.809	5.195	5.000

## 2.2. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja Transformasi BRSDM ke BPPSDM Tahun 2023-2024

Tabel 2. Target Indikator Kinerja BRSDM Transformasi ke BPPSDM Tahun 2023-2024

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Juni) 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	74,17	72
	Nilai PNPB BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731		Nilai PNPB BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731	32,06	32,134
SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392	418	402
Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3000	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.400	3.758	4.000
	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1800		Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.980	2.047	2.000
	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	12.342		Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	12.342	12.519	12.500

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Juni) 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	10	10	15
Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	39	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	44	44	53
Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	8
Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	35,5	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	-	-	-	-
	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15		Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15	16	17
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	<0,5		Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	<0,5	0	<0,5

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Juni) 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75		Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)	75	86,12	79
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)	80,5		Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5	84,33	81
	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1	3,8	3,3
	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92		Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,55	94
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)	75		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	80	86,26	82
	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (Nilai)	75		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75	81,52	76
	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)	93,75	94,05	93,76
	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86		Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)	86	92,77	86
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5		Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5	90	80

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Juni) 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5	88	80
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.195		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.235	5.996	5.423

Berdasarkan Tabel 2, terdapat penyesuaian antara lain:

A. Analisa Perubahan Sasaran Program

- Perubahan sasaran program “Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM” menjadi “Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM”.

B. Analisa Perubahan Indikator Kinerja Pogram

- Penghapusan Sasaran Program, Indikator beserta targetnya pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan berkenaan dengan revisi buka blokir dan pergeseran anggaran antar-program sebagaimana Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA) nomor S-733/AG/AG.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- Penghapusan IKU “Penilaian Mandiri RB” berkenaan dengan dukungan kegiatan utama RB general KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024.

C. Analisa Perubahan Target Indikator Kinerja Utama

- Penambahan target IKU “Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya semula 1.800 kelompok menjadi 1.980 kelompok berkenaan dengan dukungan pelaksanaan RB tematik KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024

- Perubahan target IKU “Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)” semula 3.000 kelompok menjadi 3.400 kelompok berkenaan dukungan pelaksanaan RB tematik KKP
- Perubahan target IKU “Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)” sebagaimana Keputusan Kepala BRSDM Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village BRSDM Tahun 2023.
- Penambahan volume target IKU Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya semula 39 unit menjadi 44 unit berkenaan dengan revisi pergeseran anggaran antar-RO PN.
- Perubahan target IKU “Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)” semula 75 menjadi 80 sebagaimana hasil catatan reuiu spip oleh Tim BPKP
- Perubahan target IKU “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)” semula 89 menjadi 93,75, berkenaan dengan dukungan kegiatan utama RB general KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024.
- Perubahan target IKU “Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)” semula 5.195 menjadi 5.235.

Penyesuaian Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penyesuaian Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2023		
				BRSDM		BPPSDM
				RENSTRA	PK AWAL	PK REVISI
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	70	70
		2	Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)	-	24,731	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	225	392	392
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2.000	3.000	3.400
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.500	1.800	1.980
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	-	12.342	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	11	7	10
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	-	39	44
6	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	28	11	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023				
		BRSDM		BPPSDM		
		RENSTRA	PK AWAL	PK REVISI		
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BPPSDM (nilai)	35,5	33,5	-
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	12	15	15
		12	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤1,0	≤0,5	≤0,5
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)	75	75	75
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	86,5	80,5	80,5
		15	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,0	3,1	3,1
		16	Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	88	92	92
		17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	75	75	80
		18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	1 (unit kerja)	75	75
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)	90	89	93,75
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)	88	86	86
		21	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	72,5	77,5	77,5
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	72,5	77,5	77,5
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4.800	5.195	5.235		

## 2.3 Penyesuaian Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024

Tabel 4. Penyesuaian Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2024			KET
				RENSTRA	RENJA	PK	
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	75	72	72	(a)
		2	Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)	-	-	32,134	
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintis)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	255	392	402	(a)
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2.000	3.000	4.000	(a)
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.500	1.800	2.000	(a)
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	-	-	12.500	
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	11	15	15	(b)
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	-	44	53	
6	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	30	-	-	
			Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (kebijakan)	-	8	8	(c)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2024			KET
				RENSTRA	RENJA	PK	
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BPPSDM (nilai)	36	33,5	-	
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM (unit)	13	16	17	(a)
		12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA 2022 (%)	<1	≤0,5	<0,5	(a)
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM (indeks)	76	79	79	(a)
		14	Nilai PM SAKIP BPPSDM (nilai)	86,75	77	81	(a)
		15	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3	3,3	3,3	(a)
		16	Persentase Unit kerja Lingkup BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	90	94	94	(a)
		17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDM (%)	80	80	82	(a)
		18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDM (Nilai)	1 (unit kerja)	76	76	
		19	Nilai IKPA Lingkup BPPSDM (nilai)	90	93,76	93,76	(a)
		20	Nilai NKA Lingkup BPPSDM (nilai)	89	86	86	(a)
		21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
		22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.000	5.423	5.423	(a)		

Target tahun 2024 pada Renstra perlu dilakukan penyesuaian dengan justifikasi antara lain :

- a. Prognosa capaian 2023;
- b. Penyesuaian kebijakan BPPSDM berupa dukungan terhadap program prioritas KKP
- c. Penyesuaian terkait beralihnya tuisi kebijakan pada BPPSDM.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Seluruh perubahan pada reviu atas Revisi Rencana Strategis BPPSDM tahun 2023-2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkup BPPSDM dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.

Jakarta, 19 Februari 2024  
Kepala BPPSDM



I Nyoman Radiarta